

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Kesejahteraan sosial merupakan salah satu aspek yang penting dalam pembangunan suatu bangsa. Kesejahteraan baik individu ataupun masyarakat merupakan suatu indikator dalam berhasil atau tidaknya penyelenggaraan pemerintahan pada masa tersebut. Peningkatan taraf hidup masyarakat merupakan suatu tujuan yang ingin dicapai pemerintah guna menjadikan suatu bangsa yang mandiri dan kuat. Oleh karenanya terdapat berbagai program yang diselenggarakan pemerintah, baik bekerja sama secara penuh ataupun tidak dengan instansi lainnya sebagai upaya untuk mendorong kemajuan bangsa diantaranya adalah program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dilaksanakan sejak 2005 merupakan program jangka pendek yang bersifat sementara yang dilaksanakan oleh pemerintah. Program ini dijalankan sebagai bantuan bagi rakyat miskin pada saat terjadinya kebijakan pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mengakibatkan naiknya harga BBM.

Bantuan Langsung Tunai yang diberikan oleh pemerintah yakni sebesar Rp 100.000 per bulan per rumah tangga sasaran. Bentuk uang tunai ini diberikan untuk mencegah turunnya daya beli masyarakat miskin akibat naiknya harga BBM. Namun melihat hasil evaluasi tahun pada tahun 2006 yang dilakukan oleh 56 perguruan tinggi dan lima organisasi masyarakat memperlihatkan tingkat efektifitas program bantuan langsung tunai di tahun 2005 yakni 54,9%. Sehingga masih banyak diperlukan perbaikan agar program ini tidak hanya untuk sementara melainkan dapat berkelanjutan dengan sistem yang baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

I.2 Rumusan Masalah

1. Apakah yang dimaksud dengan masyarakat miskin?
2. Bagaimana pengaruh kenaikan BBM terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat miskin?
3. Bagaimana tingkat efektifitas kebijakan sistem BLT sebagai program pemerintah terhadap kondisi sosial masyarakat?
4. Bagaimana gender berperan dalam meningkatkan efektifitas BLT yang diberikan pada Masyarakat miskin?

I.3 Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari gagasan tertulis ini adalah untuk mengidentifikasi tolak ukur masyarakat yang tergolong dengan masyarakat miskin, mengetahui bagaimana pengaruh kenaikan BBM terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat miskin serta bagaimana keefektifan kebijakan serta sistem BLT sebagai program pemerintah terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat dan mengetahui bagaimana gender dapat menjadi solusi atas masalah-masalah yang ada.

BAB II

PENDEKATAN TEORITIS

2.1 Definisi dan Konsep Miskin

Kemiskinan mempunyai pengertian yang beragam. Sumodiningrat (1999) mengklasifikasikan pengertian kemiskinan sekurang-kurangnya dalam lima kelas, yaitu: pertama, kemiskinan absolut. Apabila tingkat pendapatan seseorang di bawah garis kemiskinan atau jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, antara lain kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, papan, dan pendidikan yang diperlukan untuk hidup dan bekerja. Kedua, kemiskinan relatif yakni bila seseorang mempunyai penghasilan di atas garis kemiskinan, tetapi relatif lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan masyarakat sekitarnya. Ketiga, kemiskinan kultural yakni mengacu pada sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya yang tidak mau berusaha untuk memperbaiki tingkat kehidupan meskipun ada usaha dari pihak luar yang berupaya membantu. Keempat, kemiskinan kronis yang disebabkan oleh beberapa hal yaitu kondisi sosial budaya yang mendorong sikap dan kebiasaan hidup masyarakat yang tidak produktif, keterbatasan sumber daya dan keterisolasian dan rendahnya taraf pendidikan dan derajat perawatan kesehatan, terbatasnya lapangan pekerjaan dari ketidakberdayaan masyarakat dalam mengikuti ekonomi pasar. Kelima, kemiskinan sementara, terjadi akibat adanya perubahan siklus ekonomi dari kondisi normal menjadi krisis ekonomi, perubahan yang bersifat musiman.

Sumodiningrat *dalam* Tarmidi 2006, menyatakan bahwa kebijakan strategi penanggulangan kemiskinan nasional, dapat dilakukan dengan dua cara:

1. Mengurangi beban pengeluaran konsumsi masyarakat miskin melalui bantuan langsung masyarakat, dengan melakukan tiga pemberdayaan. Pendekatan pemberdayaan dimaksud adalah (1) pemberdayaan usaha, (2) pemberdayaan sosial kemanusiaan, dan (3) penataan/pendayagunaan

sarana dan prasarana lingkungan yang mendukung usaha (kegiatan produktif) masyarakat miskin.

2. Peningkatan produktivitas masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatannya, dilakukan melalui pengembangan dan pemberdayaan usaha masyarakat terutama usaha mikro, kecil dan menengah. Pendanaan disalurkan melalui dua jalur yaitu melibatkan peran lembaga keuangan baik bank maupun non bank dan bantuan pemerintah dalam bentuk bantuan langsung kepada masyarakat.

2.2 Modal Sosial

Modal sosial ini adalah segala sistem yang mengacu kepada atau hasil dari organisasi sosial, budaya dan ekonomi. Modal sosial berkaitan erat dengan perdamaian maupun konflik kekerasan. Diantara modal sosial dengan perdamaian dan kekerasan, terdapat variabel antara, yaitu kohesi sosial. Kohesi sosial yakni terintegrasinya dimensi modal sosial pada tingkat horizontal dan vertikal. Bila kohesi sosial kuat, maka konflik kekerasan dapat dihindari.

2.3 Gender

Menurut H.T. Wilson (1989) dalam *Sex dan Gender* mengartikan gender sebagai suatu dasar untuk menentukan pengaruh faktor budaya dan kehidupan kolektif dalam membedakan laki-laki dan perempuan. Sejalan dengan pendapat yang dikutip Elaine Showalter (1989) yang mengartikan gender lebih dari sekedar perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi social budaya, tetapi menekankan gender sebagai konsep analisa dalam mana kita dapat menggunakannya untuk menjelaskan sesuatu

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penggalan informasi dilakukan dengan studi literatur dengan pendekatan kualitatif, yaitu menggunakan informasi yang bersifat subyektif dan historis. Sedangkan pada pendekatan kuantitatif penggalan informasi dengan data-data yang objektif dan terukur seperti data-data angka dan persentase. Pendekatan ini dominan menggunakan kualitatif, yaitu membuat analisis yang di bahas secara umum kemudian dibuat suatu sintesis.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian menggunakan data sekunder yang diperoleh dari individu/ institusi/ yang melakukan penelitian terlebih dahulu daripada peneliti, yaitu di perpustakaan dan internet. Data sekunder tersebut didapatkan dengan menelusuri buku, artikel, skripsi dan laporan badan Pusat Statistik. Kemudian laporan tersebut dimaknai untuk memperkuat argumentasi yang ditegaskan oleh data atau hasil penelitian sebelumnya sebagai dasar konstruksinya (Banna, 2008).

3.3 Teknik Analisis Data

Analisis data sekunder diolah melalui tiga tahapan dan dilakukan secara bersamaan, yaitu mereduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian dan transformasi data kasar yang didapatkan melalui studi literatur berupa artikel. Penyajian data dilakukan dalam bentuk kutipan pernyataan subyek penelitian untuk menggambarkan pandangan subyek dan interpretasi melalui hasil diskusi dan analisis yang mendalam dan tahap terakhir menarik kesimpulan melalui analisis data sekunder yang didapatkan melalui studi literatur, yaitu dengan memverifikasi data dan informasi serta dilakukan *check and balance* untuk meminimalisir kesalahan interpretasi data.

BAB IV

ANALISIS DAN SINTESIS

4.1 Kemiskinan

4.1.1 Identifikasi Masyarakat Miskin

Indonesia sebagai negara berkembang yang memiliki tingkat pertumbuhan populasi yang tinggi merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Sebagai negara berkembang yang kaya baik dari sumber daya alam, budaya yang beranekaragam serta wilayah yang luas ternyata belum dapat menjadi jaminan bagi kesejahteraan masyarakatnya. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada bulan Maret 2006, jumlah penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan di Indonesia sebesar 39,95 juta (17,75 persen). Sedangkan penduduk miskin pada Februari 2005 berjumlah 35,10 juta (15,97 persen), yang artinya terdapat peningkatan jumlah penduduk miskin sebesar 3,95 juta jiwa.

Tingginya jumlah penduduk miskin di Indonesia dapat dibagi ke dalam beberapa golongan. Menurut Sumodiningrat (1999) terdapat lima kelas kemiskinan yakni kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan kultural, kemiskinan kronis dan kemiskinan sementara. Secara umum, masyarakat miskin di Indonesia dapat digolongkan ke setiap kelas tersebut sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya dari masyarakat miskin tersebut.

Kemiskinan yang ada di Indonesia termasuk fokus utama dalam pembangunan. Pembangunan yang dijalankan di berbagai bidang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia. Namun permasalahan kemiskinan harus dapat dilihat secara objektif dari berbagai sudut pandang. Karakteristik rumah tangga miskin dapat dilihat diantaranya, pertama karakteristik demografi. Dalam hal ini usia, struktur dan ukuran rumah tangga, rasio ketergantungan seseorang terhadap orang lain merupakan beberapa ciri karakteristik demografi. Pada suatu keluarga di dalam masyarakat, mayoritas terdiri dari penduduk yang berusia produktif dan non produktif. Penduduk usia produktif adalah penduduk

yang mampu untuk menghasilkan pendapatan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan penduduk non produktif yakni mereka yang tergolong belum mampu atau sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada masyarakat miskin, adanya kecenderungan yakni tingginya jumlah penduduk produktif dan non produktif yang sama-sama tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan, sehingga mereka tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kedua yakni karakteristik sosial. Hal ini dapat dilihat dari aspek kesehatan, pendidikan dan tempat tinggal. Secara umum kondisi sosial masyarakat miskin berada jauh di bawah kondisi rata-rata. Berbagai masalah timbul seperti mewabahnya berbagai penyakit akibat tempat tinggal yang tidak layak dan pola hidup yang kurang baik. Sedangkan yang ketiga yakni karakteristik geografis. Perbedaan kondisi, budaya, akses dan potensi wilayah termasuk faktor yang besar yang dapat mempengaruhi perubahan kehidupan masyarakatnya. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan akses masyarakat terhadap sumber daya yang ada. Namun kemiskinan bukan merupakan faktor yang statis dimana hal ini dapat berubah jika adanya keinginan untuk memperbaiki kehidupan yang lebih baik dari berbagai pihak terkait.

4.1.2 Kelembagaan Sosial, Modal Sosial dan Kaitannya dengan Kebijakan Pemerintah Terhadap Masyarakat Miskin

Karakteristik geografis memiliki pengaruh terhadap perkembangan masyarakat khususnya masyarakat miskin di Indonesia. Keadaan alam dan aktivitas sosial ekonomi yang berbeda antara wilayah memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat miskin.

Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman budaya. Dalam budaya tersebut terdapat berbagai macam aturan dan norma sosial yang berbeda-beda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya dimana aturan-aturan tersebut memiliki tingkat kekuatan atau pengaruh bagi masyarakatnya.

Pada masa sekarang ini masih terdapat masyarakat yang memiliki nilai kepercayaan yang kuat terhadap budaya daerahnya. Hal ini terkait dengan sistem kelembagaan sosial yang ada di daerah tersebut. kelembagaan sosial dalam hal ini

bukan merupakan suatu organisasi ilmiah. Kelembagaan dalam sosiologi diartikan sebagai suatu kompleks atau sistem peraturan yang mempertahankan nilai-nilai yang penting. Seperti masyarakat adat di gunung Halimun provinsi Jawa Barat. Salah satunya yakni kasepuhan Sinar Resmi yang masyarakatnya masih meyakini adanya ketua adat sebagai pimpinan yang nantinya akan menghubungkan masyarakat dengan pemerintah setempat. Sehingga terdapat beberapa kebijakan pemerintah yang tidak secara langsung dapat diterima masyarakat. Dimana proses ini dijalankan sebagai upaya untuk mencegah sesuatu yang dapat mengurangi nilai budaya setempat. Secara umum semua ini terkait dengan adanya modal sosial di dalam masyarakat. Modal sosial berkaitan erat dengan perdamaian maupun konflik kekerasan.

Permasalahan kemiskinan di Indonesia merupakan masalah yang utama yang harus diselesaikan bagi kemajuan negara Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik Jakarta tahun 2004, batas garis kemiskinan cenderung lebih tinggi di desa dibandingkan dengan di Kota. sebagian besar wilayah Indonesia adalah pedesaan. Dimana batas kemiskinan (Rp/Kapita/bulan) pada tahun 2004 di kota adalah 108.725, sedangkan di desa 143.455. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan yang ada. Perbedaan geografis, demografi, sosial budaya dan aktivitas ekonomi masyarakat miskin tersebut menjadi dasar perbedaan tingkat kemiskinan masyarakat.

Berbagai program penanggulangan kemiskinan demi meningkatkan kesejahteraan rakyat miskin yang dilakukan pemerintah seperti program kompensasi jangka pendek yakni program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kebijakan program pemerintah tersebut hendaknya dilakukan dengan tujuan membangun rakyat untuk lebih maju. Melalui sistem dan mekanisme yang terencana dengan baik, serta mempertimbangkan aspek konteks sosial yang sudah ada di masyarakat sejak dahulu seperti modal sosial dan kelembagaan sosial. Hal ini terkait dengan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi di pedesaan, dimana di beberapa wilayah pedesaan yang masyarakatnya cenderung homogen, memiliki nilai-nilai budaya lokal yang tinggi. Sehingga hal tersebut dimaksudkan agar kebijakan dan program pemerintah tepat sasaran dan efektif. Melalui pemahaman

karakteristik masyarakat yang beragam dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam merancang program yang tidak merusak tatanan nilai-nilai masyarakat dan menjadikan program tersebut berkelanjutan, efisien dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

4.1.3 Fenomena Kenaikan Bahan Bakar Minyak dan Dampaknya Bagi Masyarakat Miskin

Pemerintah menetapkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dalam rangka mengurangi beban subsidi pada tahun 2005. Tingkat kenaikan harga BBM kali ini tergolong tinggi dibanding kenaikan-kenaikan harga sebelumnya, yaitu bensin: 87,5%, solar: 104,8%, dan minyak tanah: 185,7%. Keputusan menaikkan harga BBM dalam negeri diambil dengan latar belakang diantaranya peningkatan harga BBM yang sangat tinggi di pasar dunia sehingga berakibat pada makin besarnya penyediaan dana subsidi yang dengan sendirinya makin membebani anggaran belanja negara. Keputusan menaikkan harga BBM dalam negeri ini diambil karena biaya subsidi BBM dalam negeri meningkat pesat dengan naiknya harga minyak mentah dunia yang mencapai di atas US\$ 120 per barel. Jika tidak dilakukannya penyesuaian harga BBM dalam negeri, APBN yang merupakan salah satu pilar perekonomian menjadi tidak berkelanjutan. Hal ini akan menyebabkan runtuhnya kepercayaan pasar yang pada gilirannya berakibat pada perekonomian nasional. Disamping itu, pemberian subsidi selama ini cenderung lebih banyak dinikmati kelompok masyarakat menengah ke atas. Dimana 20% masyarakat kelompok terkaya menikmati hampir 50% subsidi BBM atau energi yakni sebesar Rp 185 trilyun dari Rp 265 trilyun. Sementara 20% masyarakat termiskin hanya menikmati 5,15% subsidi BBM. Selain itu dengan semakin besarnya subsidi BBM mengakibatkan berbagai program untuk masyarakat miskin menjadi tidak mungkin dilaksanakan akibat terganggu¹. Penyebab lainnya yakni perbedaan harga yang besar antara dalam dan luar negeri

¹ www.bappenas.go.id

memicu terjadinya penyelundupan BBM ke luar negeri. Oleh karenanya sejak tahun 2005, melalui instruksi presiden no 12 Tahun 2005 tentang Bantuan Langsung Tunai bagi masyarakat miskin sebagai upaya menjaga daya beli bagi pemenuhan kebutuhan hidup.

Penyaluran BLT merupakan suatu bentuk kerjasama antara Depsos, PT Pos Indonesia dan PT BRI Tbk yang didasarkan pada fungsi dan tugas pokok masing-masing sehingga masing-masing lembaga bertanggung jawab terhadap kelancaran bidang tugas masing-masing. Bentuk kerja sama ini dimaksudkan untuk mempercepat proses penyaluran dana BLT kepada kelompok sasaran sehingga pemanfaatannya menjadi lebih optimal

4.2 Bantuan Langsung Tunai

4.2.1 Pemantauan dan Evaluasi Program Bantuan Langsung Tunai

Kebijakan pemerintah untuk melakukan program Bantuan Langsung Tunai sejak tahun 2005 menghasilkan pihak yang pro dan kontra terhadap pelaksanaan dan hasil dari program ini. Program jangka pendek yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat miskin ini merupakan kompensasi atas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Penyaluran bantuan langsung tunai yang pertama kali pada tahun 2005 menghasilkan beberapa kejadian atau peristiwa sebagai suatu dampak dari adanya sistem dan model penyaluran yang kurang tepat. Salah seorang Kepala Desa di kecamatan Pacet meninggal akibat amarah warga yang tidak mendapat bantuan langsung tunai (BLT). Selain itu di daerah Pasir Jambu, kantor kepala desa di bakar sedangkan Kepala dan Sekretaris Desa dihakimi warganya sendiri akibat mereka tidak mendapat bantuan langsung tunai ini. Selain itu adapula kasus dimana adanya pemotongan uang BLT oleh para ketua Rukun Tetangga (RT) ataupun ketua Rukun Warga (RW). Berbagai macam argumentasi dikeluarkan, salah satunya yakni untuk biaya operasional dan keamanan bagi para aparat tersebut selama proses penyaluran BLT berlangsung dan diberikan secara sukarela oleh warga. Padahal pemerintah pusat telah menekankan bahwa uang BLT tersebut harus diserahkan secara penuh kepada masyarakat miskin.

Permasalahan yang timbul akibat adanya BLT tidak hanya mencakup aparat pemerintah, namun juga meliputi masyarakat miskin penerima BLT. Mayoritas penerima BLT adalah keluarga atau rumah tangga miskin. Namun di satu pihak masih banyak keluarga atau rumah tangga yang sama miskinnya dilaporkan tidak menjadi penerima. Adapun di pihak lain, ditemukan beberapa rumah tangga mampu yang mendapatkannya. Ketidaktepatan sasaran ini menimbulkan ketegangan sosial baik yang berbentuk keluhan hingga demonstrasi. Ketegangan tersebut antara lain disebabkan oleh lemahnya sosialisasi serta ketiadaan pedoman umum mengenai program yang dapat menjadi acuan bagi berbagai pihak yang berkepentingan, pelaksanaan pendataan rumah tangga miskin yang kurang terbuka dan mengikutsertakan masyarakat, dan petugas pendataan tidak sepenuhnya mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.

Pendataan rumah tangga miskin dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan dibantu pencacah yang terdiri dari petugas lapangan keluarga berencana (PLKB), kader Badan Kordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), anggota karang taruna, pegawai kelurahan, serta pencacah lainnya yang ditunjuk BPS. Pencacah mendapat pelatihan sehari mengenai tata cara pendataan dan penjelasan ringkas tentang berbagai formulir yang akan digunakan dalam pendataan. Proses penjaringan keluarga atau rumah tangga miskin secara umum hendaknya berlangsung sebagai berikut:

1. Pencacah meminta daftar keluarga atau rumah tangga miskin kepada ketua RT yang kemudian dilengkapi dengan daftar keluarga atau rumah tangga miskin dari sumber lain dan dilakukan observasi langsung ke masing-masing rumah untuk menilai layak tidaknya diajukan sebagai keluarga atau rumah tangga yang diduga miskin.
2. Daftar yang sudah dinilai diserahkan kepada petugas BPS untuk dilakukan verifikasi secara kasat mata guna menentukan keluarga yang layak untuk di data sebagai keluarga atau rumah tangga miskin.
3. Pencacah menerima daftar keluarga atau rumah tangga layak di data yang kemudian dicacah dengan menggunakan formulir Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk 2005 Rumah Tangga (PSE05.RT).

4. Formulir yang sudah terisi diserahkan ke BPS provinsi untuk dimasukkan sebagai data dan hasilnya dikirim ke BPS Pusat untuk dilakukan penghitungan skor dalam rangka penetapan keluarga atau rumah tangga sasaran program BLT.

Namun ditemukan indikasi bahwa tidak semua prosedur pendataan tersebut diikuti. Diantaranya verifikasi kasat mata secara menyeluruh hanya dilakukan pada beberapa rumah tangga saja. Selain itu adapula pencacah yang tidak menghubungi ketua RT untuk membuat daftar keluarga atau rumah tangga miskin awal. Lalu ditemukan juga bahwa pengisian formulir PSE05.RT secara langsung dari rumah ke rumah hanya dilakukan terhadap sebagian warga kecil rumah tangga.

4.2.2 Peranan Gender dalam Peningkatan Efektifitas Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Program Bantuan Langsung Tunai yang dijalankan pemerintah sejak 2005 menuai berbagai pendapat sebagai respon atas kebijakan tersebut. Evaluasi dari tingkat keberhasilan kebijakan ini dapat dilihat dari tingkat efektifitasnya. Tingkat efektifitas BLT yang dilakukan oleh 56 perguruan tinggi dan lima organisasi yakni Nahdatul Ulama, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, dan Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat, pada tahun 2006 mendapatkan bahwa tingkat efektifitas BLT yakni 54,9 %. Nilai tersebut menggambarkan masih dibutuhkan banyaknya perbaikan dalam program ini. Bantuan Langsung Tunai yang dijalankan pemerintah untuk meringankan beban masyarakat miskin hendaknya melihat kondisi masyarakat miskin lebih jelas dan terencana sehingga biaya bantuan tersebut bermanfaat bagi masyarakat miskin dan pemerintah serta pihak lainnya.

Peranan gender dalam BLT bukan berarti membedakan wanita dan pria berdasarkan jenis kelamin tetapi lebih menekankan pada keadilan dalam pekerjaan dan kehidupan sosialnya. Namun pada umumnya wanita akan lebih berperan dalam pengaturan ekonomi keluarga khususnya pemenuhan kebutuhan

sehari-hari seperti makanan. Hal ini dikarenakan seorang wanita akan cenderung mengatur jumlah makanan dan jenis makanan yang akan disediakan pada hari tersebut dan hari selanjutnya sesuai dengan kondisi ekonomi dan jumlah anggota keluarga.

Pemberian BLT yang sadar gender, akan membantu meminimalisir pemakaian uang BLT untuk hal-hal yang tidak berguna dan tidak bermanfaat. Hal ini dikarenakan banyak warga penerima BLT yang kurang arif serta menjadi konsumtif dalam penggunaan uang BLT. Seperti yang terjadi di dua kecamatan Kabupaten Klaten dimana diketahui pemberian BLT telah meningkatkan pendapatan rumah tangga petani Rp.90.792 per bulan atau 18,46 % dan menaikkan pengeluaran sebesar Rp.171.372 atau naik 35.15 % dibanding sebelum menerima BLT. Peningkatan konsumsi non pangan lebih besar dibanding peningkatan pangan². Melalui perbaikan sistem dan mekanisme penyaluran BLT yang lebih jelas dan terkontrol, hendaknya ada pemantauan yang lebih dalam dan spesifik terhadap masyarakat miskin. Pemantauan tersebut tidak hanya mengenai bentuk fisik rumah, pekerjaan, jumlah anggota keluarga, namun juga perlu ditambahkan bahwa siapa yang lebih berperan dalam pengaturan perekonomian keluarga. Hal ini ditujukan sebagai pengawasan agar BLT tersebut sesuai dengan yang diharapkan yakni memberi bantuan langsung kepada masyarakat miskin sebagai upaya mengurangi beban kehidupan mereka.

Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang secara jumlah jauh dari kecukupan untuk memenuhi kebutuhan hidup, hendaknya diiringi dengan pemenuhan kebutuhan mendesak yang dirasakan masyarakat miskin. Salah satu bentuknya yakni dengan pembangunan dapur umum karena pada beberapa wilayah banyak masyarakat yang tidak memiliki dapur. Adapun dana pembangunan tersebut diambil dari sebagian dana Bantuan Langsung Tunai yang sebelumnya dilakukan pengkajian secara mendalam dan identifikasi kebutuhan terbesar masyarakat pada daerah tersebut. Melalui dapur umum sebagai program pengembangan masyarakat, akan dapat menumbuhkan tingkat kerjasama antar

² Nuning Setyowati, SP. Dampak Pemberian Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Petani di Kabupaten Klaten. Agribisnis IPB.

warga. Dapur umum yang dibangun secara partisipatif oleh masyarakat yang didukung pemerintah dapat dijadikan wadah bagi warga dalam bertukar informasi. Informasi tersebut dapat berguna baik pengembangan kemampuan dalam hal memasak dan rasa kekeluargaan sesama warga masyarakat. Pembangunan dapur umum yang di dalamnya terdapat pertukaran informasi seperti pembuatan masakan dan kue khususnya yang dilakukan oleh para Ibu, dapat memberikan inspirasi bagi para ibu untuk berwirausaha khususnya dalam bidang kuliner. Pada akhirnya kondisi tersebut dapat menunjang perekonomian keluarga dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga akan terbentuk jaminan sosial yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Kesejahteraan sosial merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan suatu bangsa yang oleh karena itu setelah kenaikan BBM pemerintah mengeluarkan kebijakan atau program-program yang dapat menunjang kesejahteraan sosial khususnya kesejahteraan sosial masyarakat miskin. Masyarakat yang tergolong miskin dapat diidentifikasi melalui tiga karakteristik yaitu karakteristik demografi sosial dan geografis.

Naiknya BBM akan berdampak pada stabilitas ekonomi rumah tangga masyarakat miskin, oleh sebab itu pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu bantuan langsung tunai yang dimana dinilai kurang efektif diakibatkan banyaknya para penerima BLT memanfaatkan dana tersebut untuk hal-hal yang tidak semestinya. Oleh sebab itu penyaluran BLT yang sadar gender menjadi penting disini, dimana peranan gender dalam BLT bukan berarti membedakan wanita dan pria berdasarkan jenis kelamin tetapi lebih menekankan pada keadilan dalam pekerjaan dan kehidupan sosialnya. Wanita umumnya akan lebih berperan dalam pengaturan ekonomi keluarga khususnya pemenuhan kebutuhan sehari-hari seperti makanan. Hal ini dikarenakan seorang wanita akan cenderung mengatur jumlah makanan dan jenis makanan yang akan disediakan sesuai dengan kondisi ekonomi dan jumlah anggota keluarga. Selain itu kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) hendaknya diiringi dengan pemenuhan kebutuhan mendesak yang dirasakan masyarakat miskin dimana dapat berupa pemenuhan fasilitas umum.

SARAN

1. Pemerintah diharapkan melakukan pendataan dan pengawasan yang lebih ketat dalam pendataan Bantuan Langsung Tunai (BLT) maupun dalam penyalurannya kepada masyarakat.
2. Diharapkan pemerintah dapat mendengarkan aspirasi masyarakat mengenai apa sebenarnya yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat miskin.
3. Masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) diharapkan dalam memanfaatkan dana BLT untuk hal-hal yang memang dibutuhkan dan bermanfaat bagi keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2004. Statistik Indonesia. BPS. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2006. Tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2005-2006. BPS. Jakarta
- Elaine, Showalter (Ed.). 1989. Speaking of Gender. New York & London: Routledge.
- Hamdani, Uus. *Bantuan Langsung Tunai Untuk Apa*.
<http://pps.fisip.unpad.ac.id/?q=node/96> (13 maret 2009)
- H.T., Wilson. 1989. Sex and Gender. Making Cultural Sense of Civilization. Leiden, New York. Kobenhavn. Koln: EJ, Brill.
- Nasdian, F Tonny. 2006. *Pengembangan Masyarakat*. IPB Press.
- Setyowati, Nuning. 2006. Dampak Pemberian Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Petani di Kabupaten Klaten. Pascasarjana Fakultas Pertanian IPB.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Tarmidi. 2006. Efektifitas Pengelolaan Kredit Mikro Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan dan Analisis Pendapatan Keluarga Miskin. Sarjana Fakultas Pertanian IPB.
- Usman, Syaikh dkk. 2006. Kajian Cepat Pelaksanaan Subsidi Langsung Tunai di Indonesia 2005. Di dalam *Lembaga Penelitian Semeru*. Jakarta. www.bappenas.go.id (13 maret 2009)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PESERTA

a) Peserta Pertama

Nama : Utut Septi Asrianti

Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 21 September 1988

Pekerjaan : Mahasiswa

Agama : Islam

Alamat Rumah : Komplek BDN Jl. Wesel Blok C1 No 12
Depok 16434

Alamat di Bogor : Pondok Tazkia Darmaga, Bogor

No Hp : 081384009140

E-mail : utut.septi@gmail.com

Nama Orang Tua : H. Asrohandi

RIWAYAT PENDIDIKAN

Formal:

- 1993-1994 : TK Wisanggeni
- 1994-2000 : SD Negeri Anyelir 1 Depok
- 2000-2003 : SMP Negeri 2 Depok
- 2003-2006 : SMA Negeri 3 Depok
- 2006-sekarang : Institut Pertanian Bogor

Informal :

- BBC
- LBPP-LIA

PENGALAMAN ORGANISASI

- Pakibra SMP Negeri 2 Depok
- OSIS SMA Negeri 3 Depok
- HIMASIERA (Himpunan Mahasiswa Peminat Ilmu Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat) divisi Jurnalistik
- DPM FEMA (Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekologi Manusia)
- IAAS (International Association of Student in Agricultural and Related Sciences) LC-IPB

KARYA ILMIAH DAN PRESTASI

- Juara II Penyaji Tingkat Nasional Program Kreativitas Mahasiswa Bidang Pengabdian Masyarakat (PKM-M) 2008
- Peserta LKTM Lingkungan Hidup 2008
- Peserta Penulisan Esai Korea Fakultas Ilmu Budaya UI 2008

b) Peserta Kedua

Nama : Syaiful Bahri
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 20 November 1988
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Belum Menikah
Alamat (Kost) : Pondok Badut
Jl. Babakan Lio No. 23 RT.09 RW.01
Balumbang Jaya 16680
Telepon : (0251) 9150608/08561700254
E-mail : ipunk_asoy_coy@yahoo.ca

PENDIDIKAN FORMAL

1993-1994 : TK HARAPAN II Jakarta Timur
1994-2000 : SD Muhammadiyah 3 Jakarta Timur
2000-2003 : SLTP Negeri 7 Jakarta Timur
2003-2006 : SMA Negeri 31 Jakarta Timur
2006-Sekarang : Mahasiswa aktif Departemen Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor

PENDIDIKAN NON-FORMAL

1998-2004 : Kursus Bahasa Inggris (Capital Course)
2003-2005 : Kursus Bahasa Inggris (LIA)
2005 : Latihan Dasar Kepemimpinann se Jakarta Timur
2008 : Seminar *Leadership "Boost Your leadership Skill"*

PENGALAMAN ORGANISASI

2004-2005 : Koordinator KISS(Kiat Study Sukses) ROHIS
SMAN 31 JAKARTA TIMUR
2007-2008 : Koordinator Divisi PSDM FORSIA IPB
2007-2008 : Staff PSDMK BEM FEMA IPB

c) Peserta Ketiga

Nama : Zessy Ardinal Barlan

Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 19 Juli 1989
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Alamat Rumah : Jalan Pupuk II no 1, Balikpapan
Kalimantan Timur
Alamat di Bogor : Pink Kost Darmaga, Bogor
No Hp : 08195588336
E-mail : zessyzessy@yahoo.com
Nama Orang Tua : Zainal Arifin

RIWAYAT PENDIDIKAN

Formal:

- 1994-1995 : TK Tugu Ibu Depok
- 1995-2001 : SD Negeri Kenari Tinggi II Ternate
- 2001-2004 : SMP Negeri 2 Cilacap
- 2004-2007 : SMA Negeri 1 Balikpapan
- 2007-sekarang : Institut Pertanian Bogor (IPB)

PENGALAMAN ORGANISASI

- Musyawarah Perwakilan Kelas SMA Negeri 1 Balikpapan
- DPM TPB IPB (Dewan Perwakilan Mahasiswa Tingkat Persiapan Bersama)
- DPM FEMA (Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekologi Manusia)

